



Sesalkan Menkes Legalkan Kerancuan Rumah Sehat

► Komisi E Panggil Dinkes untuk Klarifikasi

Gambir, Warta Kota

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyesalkan sikap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang melegalkan kerancuan penjenamaan rumah sakit jadi rumah sehat. Adapun penjenamaan itu diubah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu (5/8/2022) lalu, sehingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta menjadi Rumah Sehat Untuk Jakarta.

"Menteri Kesehatan menurut saya jadi melegalkan kerancuan rumah sehat untuk rumah sakit, karena tidak bermakna dalam upaya promosi kesehatan," ujar anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak pada Senin (8/8/2022).

Gilbert mengatakan, jika latar belakang tidak sesuai bidang yang hendak dirombak, ada baiknya menghargai disiplin ilmu yang mengeluti konsep tersebut. Dia menyebut, konsultasi ke ahli Ilmu Kesehatan Masyarakat dan ahli tata bahasa akan menjernihkan kerancuan ini sebelum terlalu jauh.

Menurutnya, alasan Gubernur DKI dan Menteri Kesehatan untuk penjenamaan rumah sehat untuk rumah sakit adalah agar masyarakat lebih menyadari perlunya hidup sehat. Upaya promotif preventif akan menurunkan angka kematian dan mengurangi biaya layanan kuratif.

"Akan tetapi kontradiktif dengan realita, preventif berupa Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di DKI sebagai kota dengan penduduk sekitar 11 juta jiwa. Ini kalah dengan provinsi di Jawa yang penduduknya 35 juta dengan daerah yang sangat luas," jelas Gilbert yang juga menjadi anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Minta Klarifikasi

Sementara Komisi E DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Dinas Kesehatan DKI Jakarta menuntut perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan mengatakan, dinamika yang memicu simpang siur perlu

Pola pikir bahwa rumah sakit itu terkesan hanya untuk pengobatan, tapi dikemukakan arahnya menjadi preventif. Jadi tidak selalu yang datang ke situ orang sakit, justru sebelum sakit datang ke RS untuk melakukan check up agar kondisinya mungkin menjadi lebih baik.

dipertanyakan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Kalau dijawab di media mungkin bisa bergeser narasinya, tidak sesuai apa yang diharapkan. Jadi ini memang harus ada forum resmi, dan kami menunggu pelaksanaannya untuk klarifikasi Dinkes," kata Ali pada Senin (8/8/2022).

"Dari Komisi E berencana untuk melakukan rapat kerja nanti dengan Dinas Kesehatan untuk menanyakan lebih lanjut terkait hal ini," lanjut Ali yang juga menjadi Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta ini.

Ali mengaku sudah menanyakan hal ini kepada Kepala Dinkes DKI Jakarta Widyastuti. Dia berujar, penjenamaan rumah sehat untuk membangun paradigma di masyarakat bahwa fasilitas tersebut tidak hanya untuk mengobati orang yang sakit, tetapi dapat dinikmati orang sehat dalam menjaga kesehatannya melalui upaya promotif dan preventif.

"Pola pikir bahwa rumah sakit itu terkesan hanya untuk pengobatan, tapi dikemukakan arahnya menjadi preventif. Jadi tidak selalu yang datang ke situ orang sakit, justru sebelum sakit datang ke RS untuk melakukan check up (pemeriksaan kesehatan) agar kondisinya mungkin menjadi lebih baik," jelasnya. (faf)